

Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Pencapaian Anak Indonesia Tumbuh Sehat dan Cerdas (Studi Kasus di SMPN 2 Nanga Pinoh)

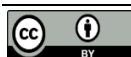
Ulfa Mahira

Administrasi Publik, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia
email: ulfa130919@gmail.com

Abstract

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a government policy aimed at improving the nutritional quality of students and supporting the development of a healthy and intelligent Indonesian generation. This study was conducted because various obstacles in the program's implementation in schools—which could potentially affect the effectiveness of achieving the policy's objectives—have been identified. The study employed a qualitative method with a descriptive approach and was analyzed using George Edward III's policy implementation theory, which encompasses the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The study's informants consisted of 9 teachers and 16 students from SMP Negeri 2 Nanga Pinoh, selected through purposive sampling. The results indicate that the program provides benefits in the form of increased energy for learning, a feeling of fullness during study sessions, and savings on students' snack money. However, the program's effectiveness remains hindered by disruptions to teaching and learning activities, a lack of variety in the menu, low levels of regular consumption by students, issues with food packaging, and weak coordination and distribution procedures. Therefore, improvements are needed in menu variety, strengthening of distribution SOPs, enhancement of packaging quality, and ongoing evaluation and coordination to ensure that the implementation of the MBG Program is more effective, efficient, and sustainable in supporting the growth of healthy and intelligent Indonesian children.

Keywords: *Policy Effectiveness, Child Nutrition, Free Nutritious Meals Program (MBG), Public Policy*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Permasalahan stunting, wasting, dan underweight masih menjadi tantangan utama pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan

dan dikutip UNICEF, prevalensi stunting nasional menurun menjadi 19,8%, wasting menjadi 7,4%, dan overweight menjadi 3,4%. Meskipun menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, UNICEF menegaskan bahwa sekitar 2,3 juta anak Indonesia masih mengalami stunting dan terdapat kesenjangan yang cukup besar antarwilayah dalam pencapaian indikator gizi anak. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena stunting merupakan bentuk kekurangan gizi kronis yang berdampak pada gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas ekonomi pada masa dewasa. Sementara itu, wasting mencerminkan kekurangan gizi akut yang meningkatkan risiko kesakitan dan kematian anak, sedangkan underweight menunjukkan akumulasi masalah gizi kronis dan akut yang menghambat kualitas tumbuh kembang anak. Temuan tersebut sejalan dengan kajian Beal yang menyimpulkan bahwa rendahnya status sosial ekonomi rumah tangga, pendidikan ibu, kualitas sanitasi, akses air bersih, dan layanan kesehatan merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi stunting di Indonesia (Beal, Tumilowicz, Sutrisna, Izwardy, & Neufeld, 2018). Dengan demikian, stunting, wasting, dan underweight tidak hanya menjadi persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia dan pencapaian pembangunan nasional di masa depan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan gizi anak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional yang mendukung pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan belajar, konsentrasi, motivasi, dan capaian akademik siswa. Temuan Dedy menunjukkan bahwa implementasi program makan bergizi di sekolah berkontribusi terhadap peningkatan energi siswa, keterlibatan dalam pembelajaran, perilaku hidup sehat, dan disiplin belajar, meskipun masih ditemukan tantangan pada aspek logistik, infrastruktur, dan koordinasi pelaksana (Dedy, Danim, & Khairi, 2026). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Risnawati yang menemukan bahwa MBG membantu meningkatkan kesiapan fisik dan mental siswa sebelum mengikuti proses pembelajaran sehingga mendorong efektivitas belajar di kelas (Risnawati, Suriansyah, & Harsono, 2026). Selain itu, Wijaya melalui studi literatur menunjukkan bahwa program MBG memiliki pengaruh positif terhadap motivasi belajar, konsentrasi, kehadiran siswa, partisipasi dalam kelas, serta prestasi akademik (Wijaya, et al., 2026).

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkatkan status gizi, kesehatan, dan kualitas pembelajaran peserta didik, realitas implementasi di tingkat sekolah menunjukkan adanya dinamika yang beragam. Temuan penelitian di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, memperlihatkan bahwa pelaksanaan program tidak selalu menghasilkan pengalaman yang sama bagi seluruh pihak yang terlibat. Hasil wawancara dengan guru dan peserta didik menunjukkan adanya beragam pandangan mengenai implementasi program

tersebut. Beberapa guru, seperti Eta Efrita, Ayu Widyawati, dan Dwi Marselina, menyampaikan bahwa “proses pembagian makanan dikoordinasikan oleh guru piket dan didistribusikan kepada siswa pada saat jam istirahat, namun menurut pengamatan mereka belum terlihat perubahan yang signifikan terhadap tingkat konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar sebelum maupun sesudah program dijalankan.” Sementara itu, Eli Suryani, Faturiani, Estewa, dan Wahyu Marini mengungkapkan bahwa “pelaksanaan program cukup menyita waktu pembelajaran karena proses distribusi makanan kepada jumlah siswa yang banyak sering menyebabkan keterlambatan siswa kembali ke kelas setelah jam istirahat.” Dari sisi peserta didik, Rani Fitri, Raihan Fadilah, dan M. Fathir Nadif menyatakan bahwa “menu makanan yang disajikan cenderung kurang bervariasi, didominasi oleh telur, dengan cita rasa yang dinilai tidak konsisten.” Beberapa siswa juga mengaku “merasa mengantuk setelah mengonsumsi makanan yang diberikan.” Berbagai tanggapan tersebut menjadi informasi penting untuk memahami bagaimana implementasi Program MBG diterima oleh pelaksana maupun penerima manfaat, sekaligus memberikan gambaran mengenai manfaat dan kendala yang masih perlu dievaluasi guna meningkatkan efektivitas program dalam mendukung status gizi, kesehatan, dan proses pembelajaran peserta didik.

Keberhasilan suatu program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengelola aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan George C. Edward III. Penelitian mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pandeglang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kompleksitas struktur birokrasi menjadi hambatan utama dalam pencapaian target kebijakan (Purbasari, Budiati, & Arenawati, 2026). Temuan serupa juga ditemukan pada implementasi program penanggulangan stunting di Kota Balikpapan yang menunjukkan adanya distorsi komunikasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, belum tersedianya prosedur operasional yang memadai, serta perbedaan pemahaman masyarakat terhadap masalah stunting yang menyebabkan tujuan program tidak sepenuhnya tercapai (Suwiryono & Mulyani, 2026). Selain itu, penelitian Mutmainnah mengenai implementasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan bahwa tantangan koordinasi antarinstansi, konvergensi program, serta monitoring dan evaluasi masih menjadi persoalan yang memengaruhi efektivitas kebijakan (Mutmainnah, Pardi, Rusdiono, Marini, & Syeftiani, 2024).

Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya pada tahap awal, tetapi juga oleh proses evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Melalui evaluasi tersebut, berbagai kekurangan maupun hambatan yang muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali lebih awal sehingga menjadi dasar untuk melakukan perbaikan. Dengan cara ini, tujuan utama MBG dalam meningkatkan status gizi anak sekolah

sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang diharapkan dapat tercapai secara lebih efektif.

George C. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur yang saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi dan sumber daya merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Informasi mengenai tujuan, aturan, dan mekanisme pelaksanaan perlu dipahami secara sama oleh seluruh pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran selama pelaksanaan program. Sementara itu, keberadaan sumber daya memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dapat diterapkan sesuai dengan rencana. Sumber daya tidak hanya berkaitan dengan pendanaan, tetapi juga mencakup ketersediaan tenaga pelaksana, sarana pendukung, informasi, serta kewenangan yang diperlukan. Apabila salah satu unsur tersebut belum terpenuhi secara memadai, pelaksanaan kebijakan berpotensi mengalami hambatan.

Hubungan antara komunikasi dan sumber daya telah banyak dijelaskan dalam berbagai penelitian implementasi kebijakan. Penelitian Purbasari mengenai program penurunan stunting di Kabupaten Pandeglang, misalnya, menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antarlembaga serta kelancaran penyampaian informasi. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa komitmen pelaksana yang didukung oleh sumber daya yang memadai menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan program (Purbasari, Budiati, & Arenawati, 2026). Hasil yang tidak jauh berbeda diperoleh Ananda dan Dina (2025) dalam kajian mengenai percepatan penurunan stunting di Desa Cilengkrang. Mereka menemukan bahwa komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai media, disertai dukungan sumber daya dan keterlibatan aktif para pelaksana, berkontribusi terhadap tercapainya tujuan program. (Ananda & Dina, 2025). Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi yang efektif akan memberikan hasil yang lebih baik apabila ditopang oleh sumber daya yang memadai.

Selain komunikasi dan sumber daya, George C. Edward III juga menempatkan disposisi dan struktur birokrasi sebagai faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, serta kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sikap yang positif memungkinkan pelaksana tetap menjalankan tugasnya secara konsisten meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan. Adapun struktur birokrasi berfungsi mengatur hubungan kerja melalui pembagian tugas, prosedur operasional, serta mekanisme koordinasi yang jelas sehingga setiap pelaksana memahami peran dan tanggung jawabnya.

Pentingnya kedua dimensi tersebut juga terlihat pada sejumlah penelitian terdahulu. Kardinal meneliti implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, dan menemukan bahwa pencapaian tujuan program masih dipengaruhi oleh kelemahan pada aspek disposisi maupun struktur birokrasi (Kardinal, Hartawan, & Chaeriah, 2024). Temuan serupa

disampaikan Suwiryono dan Mulyani (2026) dalam penelitian di Balikpapan. Mereka mengidentifikasi bahwa rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, prosedur operasional yang belum berjalan secara optimal, serta koordinasi birokrasi yang belum sepenuhnya efektif menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan program. Hasil-hasil penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh komitmen pelaksana dan tata kelola organisasi yang mampu mendukung pelaksanaan di lapangan.

Berbagai hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Suwiryono & Mulyani, 2026). Kelemahan pada salah satu unsur akan memengaruhi pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan sehingga pencapaian tujuan program menjadi kurang optimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam meningkatkan status gizi dan kesehatan peserta didik, mengidentifikasi dampak program terhadap minat serta prestasi belajar siswa, menilai pelaksanaan program dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan implementasinya, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas, kualitas pelaksanaan, dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya mendukung terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdayasaing.

Pertimbangan tersebut menjadi dasar pemilihan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai landasan analisis dalam penelitian ini. Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk mengkaji pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh. Melalui kerangka tersebut, penelitian diarahkan tidak hanya untuk mendeskripsikan pelaksanaan program, tetapi juga untuk memahami berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan kebijakan pada tingkat implementasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan situasi yang terjadi secara langsung di lingkungan sekolah. Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengujian hipotesis ataupun pemberian perlakuan terhadap objek penelitian, melainkan pada upaya menggambarkan fakta, pengalaman, serta pandangan para informan secara utuh. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif berlandaskan filsafat postpositivisme dan

dilaksanakan pada kondisi yang alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan, penafsiran, dan analisis data.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan program diamati dari berbagai aspek yang muncul selama penerapannya di sekolah. Informasi yang dikumpulkan mencakup proses distribusi makanan, keterlibatan pihak sekolah, tanggapan peserta didik terhadap makanan yang diterima, serta berbagai perubahan maupun kendala yang dirasakan setelah program berjalan. Lingkup tersebut dipilih agar penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi MBG beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Informan penelitian terdiri atas guru dan peserta didik SMP Negeri 2 Nanga Pinoh yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Penentuan informan didasarkan pada tingkat keterlibatan mereka dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sehingga informasi yang diberikan sesuai dengan fokus penelitian. Guru dipilih karena memiliki kesempatan mengamati perubahan yang terjadi pada peserta didik sejak program diterapkan, baik yang berkaitan dengan aktivitas belajar maupun kondisi siswa selama berada di sekolah. Sementara itu, peserta didik menjadi sumber informasi utama karena mereka mengalami secara langsung proses penerimaan makanan, merasakan manfaat program, sekaligus menghadapi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaannya. Perbedaan perspektif dari kedua kelompok informan tersebut memberikan data yang saling melengkapi sehingga analisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Komunikasi

Tabel 1. Temuan Dimensi Komunikasi

Indikator	Guru (n=9)	Persentase	Siswa (n=16)	Persentase
MBG mengganggu KBM	7	77,80%	-	-
Mengusulkan variasi menu	9	100%	12 mengeluhkan menu monoton	75,00%
Konsumsi MBG rutin	-	-	3	18,80%
Konsumsi MBG tidak rutin	-	-	10	62,50%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa sebagian besar guru dan siswa memberikan tanggapan yang mengindikasikan masih adanya permasalahan komunikasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak

77,8% guru menyatakan bahwa program mengganggu kegiatan belajar mengajar karena distribusi makanan dilakukan pada waktu yang kurang tepat.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

"Proses pembagian makanan dikoordinasikan oleh guru piket dan didistribusikan kepada siswa pada saat jam istirahat, namun menurut pengamatan mereka belum terlihat perubahan yang signifikan terhadap tingkat konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar sebelum maupun sesudah program dijalankan." (Guru Eta Efrita, Ayu Widyawati, dan Dwi Marselina, wawancara 2026)

Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi mengenai mekanisme pelaksanaan program belum dikomunikasikan secara jelas kepada pihak sekolah. Sejumlah persoalan yang muncul selama implementasi lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis, misalnya penyesuaian jadwal distribusi makanan, pengaturan waktu belajar, serta koordinasi kegiatan ketika makanan dibagikan kepada siswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi yang diterima belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pelaksana di tingkat sekolah.

Situasi tersebut dapat dipahami melalui teori implementasi kebijakan George Edward III yang menempatkan komunikasi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi. Edward III menjelaskan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*) pesan yang diterima oleh pelaksana. Ketiga unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar tujuan kebijakan dapat dipahami dan diterapkan secara tepat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah telah memahami tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi beberapa guru masih menghadapi kendala teknis saat distribusi makanan berlangsung pada jam pelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan program telah dipahami, namun petunjuk pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi operasional sekolah.

Temuan tersebut sejalan dengan Amril dan Sazali (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas Program MBG dipengaruhi oleh komunikasi yang adaptif antara pemerintah dan sekolah. Nurmansyah dan Fitriani (2025) juga menjelaskan bahwa lemahnya komunikasi dan minimnya keterlibatan pemangku kepentingan dapat menghambat implementasi kebijakan.

Aspek komunikasi juga terlihat dari masukan mengenai variasi menu. Seluruh guru mengusulkan penambahan variasi makanan, sedangkan 75% peserta didik menilai menu yang disajikan masih monoton. Kesamaan pandangan tersebut menunjukkan adanya masukan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi program.

Masukan dari guru dan peserta didik menunjukkan bahwa komunikasi perlu berlangsung secara dua arah melalui mekanisme umpan balik. Dengan demikian, berbagai kendala selama pelaksanaan dapat segera diidentifikasi dan menjadi dasar penyempurnaan Program MBG tanpa mengubah tujuan utamanya.

Selain komunikasi, penerimaan peserta didik terhadap makanan juga memengaruhi keberhasilan program. Menu yang lebih beragam cenderung meningkatkan minat siswa untuk mengonsumsi makanan yang disediakan, sedangkan menu yang monoton dapat menurunkan tingkat penerimaan meskipun kandungan gizinya telah memenuhi standar. Oleh karena itu, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh kualitas gizi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan peserta didik terhadap menu yang disajikan.

Systematic review yang dilakukan (Santana, et al., 2023) menunjukkan bahwa tingkat *acceptability* terhadap menu sekolah berpengaruh langsung terhadap tingkat konsumsi makanan. Peserta didik yang menerima menu dengan baik cenderung menghabiskan makanan yang disediakan, sedangkan menu yang kurang diminati lebih berpotensi menjadi sisa makanan (*food waste*). Oleh karena itu, variasi menu tidak hanya berkaitan dengan selera peserta didik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan perbaikan gizi.

Temuan di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh menunjukkan bahwa usulan penambahan variasi menu disampaikan baik oleh guru maupun peserta didik. Masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara untuk menyesuaikan menu dengan kondisi di lapangan tanpa mengabaikan standar gizi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan kebijakan, tetapi juga menjadi sarana menerima umpan balik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Data penelitian juga menunjukkan bahwa hanya 18,8% peserta didik mengonsumsi makanan secara rutin, sedangkan 62,5% melakukannya secara tidak rutin. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyediaan makanan bergizi belum secara otomatis membentuk kebiasaan konsumsi yang baik. Tingkat konsumsi peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti variasi menu, kebiasaan makan, dan pemahaman terhadap manfaat Program MBG.

Dalam perspektif *health communication*, penyediaan makanan perlu disertai dengan edukasi gizi yang dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi tersebut membantu peserta didik memahami bahwa Program MBG tidak hanya menyediakan makanan di sekolah, tetapi juga bertujuan membentuk kebiasaan hidup sehat. Dengan demikian, manfaat program diharapkan tidak hanya terlihat dari tersedianya makanan bergizi, tetapi juga dari perubahan perilaku konsumsi peserta didik.

Sejumlah penelitian mendukung pandangan tersebut. (Srimati, Fayasari, Telaumbauna, & Gabriella, 2026) menjelaskan bahwa tingkat penerimaan siswa terhadap menu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan Program MBG. Di sisi lain, (Maulana, Ramadhani, & Firrizqi, 2026) menekankan bahwa komunikasi yang berlangsung secara efektif mampu meningkatkan dukungan dari peserta didik, orang tua, maupun pihak sekolah terhadap pelaksanaan program. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyampaian informasi, penerimaan terhadap menu, serta partisipasi penerima manfaat merupakan unsur yang saling berkaitan. Ketika salah satu unsur belum berjalan secara optimal, efektivitas implementasi kebijakan juga berpotensi menurun.

Gambaran yang serupa terlihat pada penelitian mengenai pelaksanaan Program MBG di Bengkulu. (Dedy, Danim, & Khairi, 2026) menemukan bahwa koordinasi yang baik antara penyelenggara program dan sekolah memberikan kontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan sekaligus mendukung kesiapan belajar peserta didik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh telah mendukung pelaksanaan program, terutama dalam penyampaian informasi mengenai tujuan, mekanisme, dan jadwal distribusi makanan. Koordinasi antara sekolah, penyedia makanan, dan instansi terkait juga memungkinkan program berjalan sesuai jadwal. Namun, komunikasi tersebut masih lebih banyak berfokus pada penyampaian informasi dibandingkan penerimaan umpan balik dari peserta didik.

Kondisi tersebut tercermin dari masih ditemukannya berbagai persoalan selama pelaksanaan program, seperti variasi menu yang dinilai kurang menarik, adanya makanan yang tidak dikonsumsi hingga habis, serta rendahnya tingkat konsumsi rutin oleh sebagian siswa.

Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan tersampainya informasi, tetapi juga dengan kemampuan pelaksana memperoleh dan menindaklanjuti masukan dari penerima manfaat. Masukan mengenai variasi menu maupun kebiasaan konsumsi peserta didik dapat menjadi dasar evaluasi agar pelaksanaan program lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan perspektif George C. Edward III, aspek komunikasi dalam penelitian ini telah berjalan pada unsur transmission, tetapi unsur clarity dan consistency masih memerlukan penguatan, terutama dalam penyampaian informasi yang mampu mendorong partisipasi peserta didik. Penguatan komunikasi dua arah diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan terhadap menu, tetapi juga mengurangi sisa makanan dan mendukung pencapaian tujuan Program Makan Bergizi Gratis.

Sumber Daya

Tabel 2. Temuan Dimensi Sumber Daya

Indikator	Frekuensi	Persentase
Distribusi menyita waktu	2 guru	22,20%
Keterlambatan pengumpulan ompong	3 guru	33,30%
Kemasan makanan berkuah sering tumpah	6 siswa	37,50%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 2, temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek sumber daya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi beberapa kendala operasional. Sebanyak 22,2% guru menyatakan bahwa proses distribusi makanan menyita waktu yang cukup lama, sementara

33,3% guru mengungkapkan adanya keterlambatan dalam pengumpulan wadah makan setelah kegiatan makan selesai.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

"Pelaksanaan program cukup menyita waktu pembelajaran karena proses distribusi makanan kepada jumlah siswa yang banyak sering menyebabkan keterlambatan siswa kembali ke kelas setelah jam istirahat." (Guru Eli Suryani, Faturiani, Estewa, dan Wahyu Marini, wawancara 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya pelaksana dan mekanisme distribusi yang belum optimal masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh menunjukkan bahwa kebutuhan sumber daya belum sepenuhnya terpenuhi. Selama kegiatan berlangsung, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membantu mengawasi pembagian makanan, menjaga ketertiban siswa, serta mengumpulkan kembali ompreng setelah digunakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian kegiatan operasional masih bergantung pada tenaga pendidik sehingga berpotensi menambah beban kerja guru.

Temuan tersebut sesuai dengan pandangan George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, baik berupa tenaga pelaksana maupun fasilitas pendukung. Keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan program meskipun tujuan kebijakan telah dipahami oleh pelaksana.

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan temuan Nurmansyah dan Fitriani yang menjelaskan bahwa salah satu tantangan implementasi MBG terletak pada kesiapan sistem operasional, terutama terkait ketersediaan tenaga pelaksana, kapasitas pengelolaan, dan dukungan logistik. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa setiap tahapan implementasi, mulai dari proses penyediaan hingga distribusi makanan kepada peserta didik, memerlukan dukungan sumber daya yang memadai (Nurmansyah & Fitriani, 2025).

Persoalan operasional juga terlihat pada pengelolaan ompreng setelah kegiatan makan selesai. Sebanyak 33,3% guru menyatakan bahwa proses pengumpulan wadah makan masih sering mengalami keterlambatan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan logistik tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan, tetapi juga mencakup pengembalian peralatan makan dan penanganannya setelah digunakan.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Serang, Bolang, dan Lopian (2025) yang menunjukkan bahwa kendala implementasi MBG banyak ditemukan pada aspek distribusi dan pengelolaan operasional di tingkat sekolah.

Selain itu, 37,5% peserta didik mengeluhkan kemasan makanan berkuah yang terkadang bocor atau tumpah selama proses distribusi. Meskipun tidak dialami oleh seluruh responden, temuan ini menunjukkan bahwa fasilitas

pendukung masih perlu ditingkatkan agar makanan diterima dalam kondisi yang baik dan nyaman untuk dikonsumsi.

Oleh karena itu, penyediaan fasilitas pendukung yang layak perlu dipandang sebagai investasi untuk menjaga mutu layanan sekaligus mendukung pencapaian tujuan peningkatan status gizi.

Pengalaman pelaksanaan program makan sekolah di berbagai negara memperlihatkan kecenderungan yang serupa. Wulandari, melalui kajian mengenai sistem Kyushoku di Jepang, menjelaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kualitas menu yang disajikan, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, sistem distribusi yang tertata, standar operasional yang jelas, serta pembagian peran yang terkoordinasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat (Wulandari, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan sumber daya perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak terbatas pada penyediaan makanan, melainkan juga pada seluruh komponen pendukung implementasi.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa dimensi sumber daya dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan guru dalam pekerjaan operasional, pengelolaan logistik yang masih belum efisien, serta fasilitas distribusi yang memerlukan perbaikan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan pelaksanaan program dan sumber daya yang tersedia. Dalam perspektif George C. Edward III, kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas implementasi kebijakan karena keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya yang mendukungnya. Oleh sebab itu, penambahan tenaga operasional, penyempurnaan sistem pengelolaan omprong, peningkatan kualitas kemasan makanan, serta penguatan infrastruktur logistik menjadi langkah yang penting agar pelaksanaan Program MBG dapat berlangsung lebih efektif tanpa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi para pelaksana dan penerima manfaat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh pada umumnya berada dalam kategori positif. Meskipun masih ditemukan beberapa kendala selama pelaksanaan program, baik guru maupun siswa tetap memberikan respons yang mendukung keberlanjutan kebijakan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa berbagai kekurangan yang muncul lebih dipandang sebagai bagian yang perlu diperbaiki daripada alasan untuk menolak pelaksanaan program.

Tabel 3. Dampak Positif MBG Menurut Siswa

Dampak Positif	Jumlah	Persentase
Hemat uang jajan	9	56,30%
Perut kenyang saat belajar	8	50,00%
Lebih berenergi	8	50,00%
Semangat belajar meningkat	7	43,80%

Tabel 4. Keluhan Siswa terhadap MBG

Keluhan	Jumlah	Persentase
Menu monoton	12	75,00%
Rasa hambar	9	56,30%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki disposisi yang cenderung positif terhadap Program MBG. Meskipun 77,8% guru menganggap program berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar karena menyita waktu distribusi dan pengelolaan makanan, seluruh guru tetap memberikan berbagai masukan konstruktif berupa penambahan variasi menu, penyediaan buah dan susu, serta perbaikan sistem distribusi. Temuan ini menunjukkan bahwa para guru tidak menolak substansi kebijakan, melainkan memberikan kritik terhadap aspek teknis pelaksanaannya. Dengan kata lain, guru memiliki sikap mendukung terhadap tujuan program meskipun masih menemukan berbagai kendala operasional di lapangan.

Hal ini tercermin dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

"Proses pembagian makanan dikoordinasikan oleh guru piket dan didistribusikan kepada siswa pada saat jam istirahat, namun menurut pengamatan mereka belum terlihat perubahan yang signifikan terhadap tingkat konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar sebelum maupun sesudah program dijalankan." (Guru Eta Efrita, Ayu Widyawati, dan Dwi Marselina, wawancara 2026)

Dari sisi guru, dukungan terhadap MBG tetap terlihat meskipun sebagian besar belum merasakan perubahan yang signifikan terhadap konsentrasi belajar siswa.

Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa guru memberikan penilaian secara objektif berdasarkan kondisi yang mereka amati di lapangan. Di sisi lain, mereka tetap memahami bahwa tujuan utama program tidak hanya berkaitan dengan peningkatan prestasi belajar dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung pemenuhan gizi peserta didik sebagai investasi kesehatan dan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Sikap seperti ini mencerminkan adanya komitmen untuk tetap menjalankan program sambil membuka ruang terhadap berbagai upaya penyempurnaan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh temuan bahwa 44,4% guru mengamati adanya peningkatan semangat belajar pada sebagian siswa setelah memperoleh makanan bergizi. Walaupun dampaknya belum dirasakan secara merata oleh seluruh peserta didik, perubahan yang mulai terlihat memberikan keyakinan bahwa program memiliki manfaat nyata. Pengalaman positif semacam ini cenderung memperkuat dukungan pelaksana karena mereka dapat melihat secara langsung hasil yang mulai berkembang selama implementasi berlangsung.

Selaras dengan pandangan George C. Edward III yang menempatkan disposisi sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, serta kesediaan pelaksana

untuk menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III, komunikasi yang efektif dan sumber daya yang memadai tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila para pelaksana tidak memiliki kemauan untuk mendukung kebijakan. Oleh karena itu, sikap positif guru menjadi modal penting bagi keberlanjutan Program MBG meskipun berbagai aspek teknis masih memerlukan perbaikan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia, Azahra, dan Felisa (2025) yang menunjukkan bahwa program pemenuhan gizi di sekolah berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar, kesiapan mengikuti pembelajaran, serta partisipasi siswa di kelas. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kondisi fisik yang lebih baik akibat terpenuhinya kebutuhan gizi dapat meningkatkan kesiapan siswa untuk menerima materi pembelajaran dan mengikuti aktivitas sekolah secara optimal. Oleh karena itu, meskipun dampak akademik belum terlihat secara langsung dalam jangka pendek, manfaat fisiologis dan psikologis yang dirasakan siswa dapat menjadi indikator awal keberhasilan program. (Amalia, Azahra, & Felisa, 2025).

Respons positif juga terlihat dari sisi siswa sebagai penerima manfaat utama program. Berdasarkan Tabel 3, lebih dari separuh siswa (56,3%) menyatakan bahwa Program MBG membantu mengurangi pengeluaran uang jajan. Sebanyak 50% responden juga merasa lebih kenyang dan memiliki energi yang lebih baik selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Sementara itu, 43,8% siswa mengaku lebih bersemangat saat mengikuti pembelajaran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa manfaat program tidak hanya dirasakan dalam aspek pemenuhan makanan, tetapi juga dalam aktivitas belajar sehari-hari.

Bagi sebagian keluarga, berkurangnya pengeluaran uang jajan menjadi manfaat yang cukup penting. Makanan yang diperoleh di sekolah setidaknya dapat menggantikan sebagian kebutuhan konsumsi harian anak selama jam belajar. Selain itu, rasa kenyang yang bertahan lebih lama membuat siswa tidak mudah merasa lapar ketika mengikuti pelajaran. Kondisi ini turut membantu mereka tetap memiliki energi untuk mengikuti kegiatan sekolah hingga selesai. Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kecukupan energi dan zat gizi pada anak usia sekolah berkaitan dengan kemampuan berkonsentrasi, daya tahan tubuh, dan kesiapan mengikuti proses pembelajaran.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa catatan dari siswa terkait kualitas makanan yang disediakan. Sebanyak 75% responden menilai variasi menu belum cukup beragam, sedangkan 56,3% menyatakan cita rasa makanan belum sesuai dengan selera mereka. Data tersebut memperlihatkan bahwa siswa tidak hanya menilai manfaat program dari sisi pemenuhan kebutuhan makan, tetapi juga memperhatikan pengalaman mereka saat mengonsumsi makanan yang disediakan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

"Menu makanan yang disajikan cenderung kurang bervariasi, didominasi oleh telur, dengan cita rasa yang dinilai tidak konsisten." (Siswa Rani Fitri, Raihan Fadilah, dan M. Fathir Nadif, wawancara 2026).

Masukan yang diberikan siswa tidak menunjukkan penolakan terhadap Program MBG. Justru sebaliknya, mereka tetap mengakui manfaat program meskipun mengharapkan adanya perbaikan pada menu yang disediakan. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang masih menunjukkan penerimaan terhadap keberadaan program, sementara kritik yang muncul lebih banyak berkaitan dengan variasi dan cita rasa makanan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan siswa terhadap program masih cukup baik. Dalam kajian implementasi kebijakan, umpan balik dari kelompok sasaran sering kali menjadi bagian penting untuk menilai kualitas pelaksanaan suatu program. Oleh karena itu, masukan mengenai menu dapat dipandang sebagai bahan evaluasi yang membantu pelaksana menyesuaikan layanan dengan kebutuhan dan preferensi penerima manfaat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Lubis, Dismawan, Hapsari, Rosidin, dan Handoko (2025) yang menunjukkan bahwa variasi menu berpengaruh terhadap tingkat penerimaan siswa terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Siswa cenderung lebih antusias ketika makanan yang diberikan memiliki variasi yang cukup dan sesuai dengan selera mereka. Sebaliknya, menu yang disajikan berulang dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan kejenuhan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemenuhan standar gizi, tetapi juga pada kemampuan penyelenggara menyediakan makanan yang dapat diterima oleh siswa sebagai penerima manfaat utama.

Struktur Birokrasi

Tabel 5. Indikasi Permasalahan Struktur Birokrasi

Permasalahan	Indikasi
Gangguan KBM	SOP distribusi belum jelas
Keterlambatan pengumpulan ompreng	SOP pengelolaan alat makan belum baku
Kemasan tumpah	SOP distribusi fisik belum optimal
Menu monoton	Koordinasi antar pelaksana belum efektif

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2026

Berdasarkan Tabel 5, berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya indikasi bahwa struktur birokrasi dan prosedur operasional program belum berjalan secara optimal.

Gangguan terhadap kegiatan belajar mengajar, keterlambatan pengumpulan ompreng, kemasan makanan yang terkadang bocor saat distribusi, serta keluhan mengenai variasi menu menunjukkan bahwa masih terdapat aspek organisasi yang perlu diperbaiki. Berbagai persoalan tersebut tidak berdiri sendiri,

melainkan saling berkaitan karena melibatkan banyak pihak dalam satu rangkaian pelaksanaan program.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa distribusi makanan masih berpotensi mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pelaksanaan belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan aktivitas akademik yang berlangsung setiap hari. Pengaturan waktu distribusi, pembagian tugas, maupun alur kerja di lapangan tampaknya belum tersusun secara rinci sehingga pelaksanaan program masih memerlukan penyesuaian agar tidak mengurangi efektivitas proses pembelajaran.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara guru yang menyatakan:

"Pelaksanaan program cukup menyita waktu pembelajaran karena proses distribusi makanan kepada jumlah siswa yang banyak sering menyebabkan keterlambatan siswa kembali ke kelas setelah jam istirahat." (Guru Eli Suryani, Faturiani, Estewa, dan Wahyu Marini, wawancara 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme distribusi makanan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pembelajaran di sekolah.

Persoalan pengelolaan ompreng setelah kegiatan makan selesai masih menjadi salah satu kendala di lapangan. Proses pengumpulan wadah makan tidak selalu berjalan tepat waktu sehingga guru kembali terlibat dalam kegiatan operasional di luar tugas mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian peran antarpelaksana belum sepenuhnya berjalan secara konsisten, terutama pada tahap setelah distribusi makanan selesai.

Selain itu, terdapat keluhan dari siswa terkait kemasan makanan berkuah yang terkadang bocor atau tumpah saat distribusi. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas wadah, tetapi juga dengan alur distribusi secara keseluruhan, mulai dari proses pengemasan hingga makanan diterima oleh siswa di sekolah. Ketika salah satu tahapan tidak berjalan baik, dampaknya ikut dirasakan pada kualitas layanan yang diterima penerima manfaat.

Masalah lain muncul pada variasi menu yang dinilai masih monoton. Penyediaan makanan melibatkan banyak pihak, seperti penyusun menu, pengelola dapur, penyedia bahan pangan, hingga sekolah sebagai pelaksana di lapangan. Dalam praktiknya, koordinasi antar pihak tersebut belum sepenuhnya berjalan lancar sehingga berdampak pada terbatasnya variasi menu yang diterima siswa.

Jika dilihat dari teori implementasi kebijakan George C. Edward III, kondisi tersebut berkaitan dengan aspek struktur birokrasi. Dalam teori ini, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh adanya organisasi pelaksana, tetapi juga oleh kejelasan prosedur kerja, pembagian tugas, serta koordinasi antar unit. Ketika mekanisme tersebut belum berjalan dengan baik, pelaksanaan program yang melibatkan banyak pihak cenderung mengalami hambatan pada tahap teknis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Erinaldi, Ananta, dan Nadhira (2025) yang menunjukkan bahwa koordinasi antarpelaksana masih menjadi

tantangan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Dampaknya terlihat pada pengawasan sarana, variasi menu, dan ketepatan distribusi makanan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Hastuti, Hariyadi, dan Hariyadi (2026) bahwa program MBG melibatkan banyak institusi sehingga membutuhkan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang stabil. Tanpa itu, kendala operasional di lapangan akan mudah muncul meskipun sumber daya tersedia.

Temuan lain dari Habib, Hardiansyah, Rosidin, dan Handoko (2025) menunjukkan bahwa ketepatan waktu distribusi dan variasi menu masih menjadi persoalan yang sering muncul di sekolah. Hal ini berkaitan dengan prosedur operasional yang belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi pelaksanaan di masing-masing sekolah.

Secara keseluruhan, kondisi di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh menunjukkan bahwa aspek struktur birokrasi dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis masih perlu diperkuat. Beberapa persoalan seperti pengelolaan omprang, koordinasi antar pelaksana, serta pengawasan distribusi menunjukkan bahwa alur kerja belum sepenuhnya berjalan efektif.

Karena itu, diperlukan penyusunan SOP yang lebih jelas, pembagian tugas yang lebih terarah, serta koordinasi yang lebih konsisten antar pihak yang terlibat. Monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih tertib dan tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh telah memberikan manfaat yang dirasakan oleh peserta didik, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan makan selama berada di sekolah. Sebagian siswa mengaku merasa lebih kenyang, memiliki energi yang lebih baik untuk mengikuti pembelajaran, serta mengalami pengurangan pengeluaran uang jajan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak positif bagi penerima manfaat meskipun hasilnya belum dirasakan secara sama oleh seluruh siswa.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa berbagai kendala teknis masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Distribusi makanan yang terkadang mengganggu proses pembelajaran, pengelolaan omprang yang belum tertata dengan baik, serta kualitas kemasan makanan yang masih sering mengalami kebocoran menjadi persoalan yang paling sering muncul selama implementasi. Selain itu, siswa juga menyoroti kurangnya variasi menu dan cita rasa makanan yang belum selalu sesuai dengan selera mereka.

Apabila ditinjau menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III, faktor disposisi menjadi aspek yang relatif paling mendukung pelaksanaan Program MBG. Guru dan siswa pada umumnya menunjukkan sikap menerima serta mendukung keberlanjutan program. Sebaliknya, aspek sumber

daya, komunikasi, dan struktur birokrasi masih memerlukan perhatian lebih karena berbagai kendala yang ditemukan dalam penelitian sebagian besar berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan, dukungan operasional, dan tata kelola program.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan utama Program MBG di SMP Negeri 2 Nanga Pinoh bukan terletak pada penerimaan program oleh sasaran maupun pelaksana, melainkan pada bagaimana program dijalankan secara konsisten dan efisien di lapangan. Oleh sebab itu, perbaikan mekanisme distribusi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan koordinasi antar pelaksana menjadi langkah yang penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pada masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Amalia, Z., Azahra, N. L., & Felisa, N. (2025). The effectiveness of the free nutritious food program in increasing students' enthusiasm and interest in learning at school. *Jurnal Nasional Holistic Science*, 350-354.
- Amril, A., & Sazali, H. (2025). Formulasi Regulasi dan Kebijakan Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Pembangunan: Studi pada Program Makan Bergizi Gratis. *Jurnal Indonesia Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 1670-1679.
- Ananda, M. R., & Dina. (2025). Policy Implementation to Accelerate Stunting Reduction in Cilengkrang Village, Bandung Regency. *Social Impact Journal*, 36-43.
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition*, 1-10.
- Dedy, Danim, S., & Khairi, A. (2026). Free nutritious school meals: Effects on student well-being and learning. *Indonesian Journal of Educational Development (IJED)*, 1483-1496.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Erinaldi, Ananta, D. N., & Nadhira, S. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) (Studi Kasus pada SMA Swasta Lancang Kuning Kota Dumai). *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis)*.
- Habib, M. R., Hardiansyah, H., Rosidin, U., & Handoko, H. (2025). Evaluasi implementasi program makan bergizi gratis (mbg) di sekolah dasar x kota bandar lampung. *Didaktika Dwija Indria*, 963-969.

Hastuti, R., Hariyadi, A. M., & Hariyadi, H. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah: Tinjauan Literature terhadap Tantangan Tata Kelola dan Implikasi Kebijakan. *Pri Health Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16-21.

Kardinal, K., Hartawan, H., & Chaeriah, S. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI KECAMATAN LORE TENGAH KABUPATEN POSO. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 205-218.

Khairi, H. (2014). *Kebijakan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar*. In: *Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Lubis, M. K., Dismawan, M. F., Hapsari, S. P., Rosidin, U., & Handoko, H. (2025). Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) DI SD Negeri 1 Sukadanaham. *Didaktika Dwija Indria*, 1-5.

Masruri, G., & Nugraha, H. (2026). Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Politik Janji Pemilu: Analisis Kebijakan Anggaran dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan Indonesia dalam Menyongsong Indoensia Emas 2045. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 12100-12108.

Maulana, F., Ramadhani, H., & Firrizqi, F. (2026). Komunikasi Publik SMP Negeri Tangsel dalam Implementasi Makan Bergizi Gratis. *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 62-66.

Mutmainnah, M., Pardi, P., Rusdiono, R., Marini, M., & Syeftiani, T. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan 5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kubu Raya. *STRUKTURASI: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 242-251.

Nurmansyah, M. I., & Fitriani, A. (2025). APPLYING AN IMPLEMENTATION RESEARCH LENS TO INDONESIA'S FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM. *Indonesian Journal of Health Administration (Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia)*, 133-141.

Purbasari, A. D., Budiati, A., & Arenawati. (2026). IMPLEMENTATION OF THE STUNTING RATE REDUCTION PROGRAM IN PANDEGLANG REGENCY. *DiA: Jurnal Administrasi Publik*, 157-172.

Ramadhani, B., Maitsa, R., & Riswanda, R. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) MENURUT TEORI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK WILLIAM N. DUNN. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1761-1770.

Risnawati, E., Suriansyah, A., & Harsono, A. M. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Peningkatan Efektivitas Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 832-842.

Santana, S. A., Batista, S. A., Maynard, D. d., Ginani, V. C., Zandonadi, R. P., & Botelho, R. B. (2023). Acceptability of School Menus: A Systematic Review of Assessment Methods. *Int J Environ Res Public Health*.

Serang, A. E., Bolang, A. S., & Lopian, S. L. (2025). Evaluasi Kualitatif Logistik dan Distribusi dalam Program Makan Siang Bergizi Gratis: Studi Kasus Instrumental di Sekolah Menengah Atas Negeri, Kota Bitung, Indonesia. *Jurnal Promotif Preventif*, 1807-1814.

Srimiati, M., Fayasari, A., Telaumbauna, M. A., & Gabriella, A. (2026). Determinants of Menu Acceptability in Indonesia's Free Nutritious School Meal Program (MBG) among SD and SMP Students in North Jakarta. *JIKA: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 40-54.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwiryo, S. M., & Mulyani, R. A. (2026). Policies Lost in the Field: A Critical Study of Communication, Resources, and Bureaucratic Structure in the Stunting Program. *International Journal of Scientific Research Studies*, 31-38.

UNICEF. (2025). *Indonesia nutrition survey: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Wijaya, M. R., Andriani, E., Hatima, N. K., Julia, J., Arsita, A., & Ndibo, Y. L. (2026). DAMPAK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) TERHADAP MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR SISWA. *Strategy: Jurnal Inovasi Strategi dan Model Pembelajaran*, 408-418.

Wulandari, A. (2025). Model Kyushoku Jepang dan Tantangan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6948–6956